



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung

Telp. (0721) 704626 Fax. (0721) 704626

Transkrip Wawancara

Sikap Politik Anggota DPRD Terhadap Anggota DPRD Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung

A. Identitas Informan

1. Nama : Musabakah, Amd
2. Umur : 42 Tahun
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Fraksi : PPP
6. Jabatan : Anggota Komisi B DPRD Kota Bandar Lampung
7. Pendidikan Terakhir : D3 FE Universitas Lampung

Hasil Wawancara

Pewawancara : Apa pendapat Bapak tentang keterwakilan 30% perempuan di
Lembaga Legislatif?

Informan : Keterwakilan 30% di lembaga Legislatif DPRD penting, karena
negara kita negara demokrasi yang memberikan kewenangan dan
kesempatan keterwakilan baik itu laki-laki ataupun perempuan

yang sesuai dengan UU perpolitikan dan UU di KPU. Dan menjadi kewajiban untuk memperjuangkan Hak-hak dari perempuan baik itu sendiri dalam keterwakilannya maupun perempuan itu sendiri yang ada di Legislatif, sehingga keterwakilan 30% sangat penting didalam lembaga legislatif.

Pewawancara : Menurut Bapak adakah syarat khusus yang harus dimiliki Caleg perempuan yang berasal dari partainya agar kuota 30% di Legislatif terpenuhi?

Informan : Antara Perempuan dan Laki-laki memiliki persyaratan yang sama, masing-masing partai ada persyaratan-persyaratan tentang kualitas dan kualitas itu ada standarnya untuk menjadi anggota legislatif. Standar kualitasnya pertama dari segi pendidikan min SMA berdasarkan UU, dan diharapkan standar pendidikan ini meningkat karena dari pendidikan ini mempengaruhi kinerjanya. Kedua moralitas, pengalaman politik serta kemampuan individu itu sendiri untuk menjadi anggota legislatif.

Pewawancara : Menurut Bapak dengan adanya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif dapat meningkatkan kualitas kinerja anggota DPRD dan dapat memperjuangkan tentang kepentingan perempuan?

Informan : Didalam memperjuangkan kaum perempuan jelas ini akan berdampak positif, karena secara naluri mereka mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kaumnya. Dan masyarakat perempuan lebih mempercayakan kepada perempuan karena ada

anggota legislatif laki-laki yang tidak mengetahui perasaan atau apapun yang menjadi keinginan dari kaum perempuan dan mungkin perempuan yang dapat lebih memahami hal itu.

Pewawancara : Didalam proses pemilu yang menempatkan perempuan sebagai anggota legislatif tidak mencapai kuota 30%, permasalahan tersebut dikaitkan dengan isu primordialisme serta kultur budaya oleh masyarakat. Sebagai anggota DPRD bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut?

Informan : Ini merupakan suatu kenyataan bahwa 30% itu tidak sampai, artinya harapan-harapan itu masih jauh dan ini adalah suatu tantangan bagi kaum perempuan, artinya ada peluang-peluang yang harus dimanfaatkan yang sekarang memang belum maksimal.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh anggota DPRD agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif ?

Informan : DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap Undang-undang legislatif, menyerap aspirasi. Dari hal itu DPRD dengan cara sosialisasi dapat mengupayakan semaksimal mungkin dengan membuka peluang penuh untuk menarik calon-calon perempuan untuk menjadi caleg. Membuka ruang kepada masyarakat untuk menjadi caleg. Dan dapat mewakili ke DPRD, apabila tidak terpilih itu merupakan faktor alam, karena masyarakat yang memilih.

Pewawancara : Apa yang telah dilakukan oleh partai Bapak agar keterwakilan 30% perempuan dapat tercapai di Lembaga Legislatif?

Informan : Pertama membuka ruang kepada masyarakat bahwa khususnya partai PPP untuk mengajak kepada kaum perempuan untuk masuk kedalam partai PPP dan pengurus sudah memenuhi 30%. Kedua membuka ruang seluas-luasnya untuk perempuan mendaftar dalam pencaleg kan didalam partai PPP. Dari 10 caleg minimal 3 ataupun 4 calegnya. Dan untuk nomor urut pemilihan bukan berdasarkan gender atau jenis kelamin, akan tetapi dapat dilihat dari aktif dari partai itu, serta kontribusi di partai, dan dari hal tersebut dapat ditempatkan di nomor urut yang terbaik. Walaupun pada dasarnya suara yang terbanyak yang terpilih.

Pewawancara : Menurut Bapak pihak-pihak mana saja yang harus mengupayakan tercapainya keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Pertama organisasi-organisasi yang bergerak dibidang perempuan, LSM dibidang kewanitaan, seharusnya mereka dapat memanfaatkan ruang politik ini, mengutus orangnya yang benar-benar bisa dipercaya, mengemban amanah, memperjuangkan kaum perempuan, dari hal itu daftarkan lah di partai politik. Itu adalah salah satu mekanisme yang dijalankan untuk menjadi anggota dewan. Kemudian masyarakat itu sendiri, yang diharapkan ormas dan organisasi kewanitaan bisa berperan penuh baik secara lembaga maupun secara personal. Didalam anggota DPRD yang belum mencapai 30%, ini memang kondisi masyarakat yang mana

perempuan-perempuan ini terutama aktivis-aktivis organisasi perempuan belum sepenuhnya maksimal memberi kesadaran kepada kaum perempuan untuk memberi amanahnya kepada kaumnya. Memang butuh perjuangan yang cukup berat bagi ormas dan organisasi perempuan yang mempunyai andil besar dalam keterkaitan keterwakilan 30% perempuan.

Pewawancara : Apakah bapak setuju dengan adanya Keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif?

Informan : Setuju, sesuai aturan saja, aturan memungkinkan 30% harus dilaksanakan. Dan 30% ini sudah signifikan untuk sekarang ini, serta kemampuan-kemampuan perempuan ini cukup mumpuni untuk memperjuangkan kaum perempuan ini. Dan setiap warga indonesia mempunyai hak politik.